

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan stunting, banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan kajian di berbagai daerah dengan sudut pandang berbeda. Kajian tersebut menjadi rujukan penting sekaligus pembandingan untuk penelitian ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. **Endang Hartati. 2023. “Implementasi Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri di Wilayah Puskesmas Tapin Utara Kabupaten Tapin”.** Anemia merupakan permasalahan Kesehatan yang saat ini sering dijumpai di dunia, menurut data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan Anemia usia remaja yaitu usia 15-24 tahun sebesar 32% dan usia 5-14 tahun sebesar 26%. Di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri tahun 2021 sebesar 24,14%. Sedangkan angka kejadian anemia tahun 2022 sebesar 29,3%. Tujuan: Mengetahui pelaksanaan pemberian tablet Fe pada remaja putri di Puskesmas Tapin Utara Kabupaten Tapin. Jenis Penelitian deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Responden penelitian berjumlah 58 orang, teknik penentuan sampel dengan total sampling. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan data sekunder dengan pencatatan laporan. Analisis data menggunakan analisis univariat, disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian pada komponen input 100 % baik,

dari sumber daya manusia sudah ada tetapi untuk sarana prasarana seperti media penyuluhan, kartu implementasi gizi masih kurang, pada komponen proses 100% sudah berjalan baik tetapi pada minum tablet Fe bersama pendampingan dan pengawasan serta pencatatan perlu ditingkatkan, Komponen output sudah 100% baik, siswi mau minum tablet Fe tetapi beberapa siswi mengalami kendala seperti mual membuat enggan meminum, komponen dampak pemberian tablet Fe 100% sudah baik bagi konsentrasi belajar. Pemberian tablet tambah darah sudah berjalan baik, tetapi masih menghadapi kendala seperti kurangnya sarana, pencatatan tidak dilakukan di kartu suplementasi gizi, dan kurangnya pengawasan dan pendampingan.

2. **Nurhayati. 2023. “Hubungan Dukungan Sekolah dengan Kepatuhan Minum Tablet Tambah Darah pada Siswi SMP Negeri 1 Lubuk Besar”**. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat dialami oleh balita, remaja, ibu hamil dan usia lanjut. Kejadian anemia para remaja putri di Indonesia cukup tinggi karena kebiasaan-kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal dan kurangnya aktifitas fisik. Hal ini mendorong Kementerian Kesehatan RI melakukan program suplementasi zat besi dan asam folat untuk remaja putri. Upaya pemerintah dalam memberikan suplementasi tablet besi tidak akan berhasil menurunkan tingkat anemia pada remaja putri tanpa adanya kepatuhan dalam minum tablet tambah darah. Mengetahui hubungan dukungan sekolah dengan kepatuhan minum tablet tambah darah pada siswi SMP Negeri 1 Lubuk Besar Tahun 2023. Penelitian

merupakan penelitian observasional analitik, dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Lubuk Besar. Sampel sejumlah 176 diambil dengan proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data digunakan chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sekolah pada siswi SMP Negeri 1 Lubuk Besar sebagian besar kategori mendukung, responden (56,8%). Kepatuhan minum tablet tambah darah pada siswi SMP Negeri 1 Lubuk Besar tahun 2023, sebagian besar kategori patuh, yaitu 158 responden (89,8%). Ada hubungan dukungan sekolah dengan kepatuhan minum tablet tambah darah pada siswi SMP Negeri 1 Lubuk Besar Tahun 2023

3. **Mutiara Indahsari. 2024. “Gambaran Perilaku Remaja Putri dalam Mengonsumsi Tablet Tambah Darah di SMA Negeri 11 Gowa.**

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, pada remaja dikatakan anemia apabila kandungan Hb <12 gram/dL. Remaja putri memiliki risiko paling tinggi menderita anemia yang dapat disebabkan oleh siklus menstruasi yang menyebabkan remaja putri banyak kehilangan darah. Program pemerintah untuk mengatasi dan mencegah anemia pada remaja putri dengan memberikan tablet Fe melalui Puskesmas, kemudian Puskesmas mendistribusikan ke sekolah dengan mendroping tablet Fe 1 bulan 1 kali pada awal bulan sebanyak 4 tablet, dengan dosis 1 tablet per minggu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 64

siswi di SMA Negeri 11 Gowa. Rumusan masalah sebagai berikut yaitu gambaran perilaku remaja putri dalam mengkonsumsi tablet tambah darah di SMA Negeri 11 Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri di SMA Negeri 11 Gowa berpengetahuan baik masih memiliki perilaku konsumsi tablet tambah darah yang rendah. Perilaku tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik yang diteliti seperti mual, susah BAB dan merasa tidak perlu mengkonsumsi tablet tambah darah maupun yang tidak diteliti oleh peneliti. Diharapkan dengan adanya penelitian ini memberikan informasi dan memotivasi remaja putri terkait bahaya anemia dan dampaknya di masa depan nanti sehingga kebutuhan akan konsumsi tablet tambah darah dapat terpenuhi. keluarga berencana dapat menjadi motor penggerak kebijakan penanggulangan stunting, meskipun tetap menghadapi kendala sumber daya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dipahami sebagai seperangkat keputusan yang dibuat oleh otoritas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Keberadaan kebijakan menjadi instrumen penting dalam mengarahkan tindakan kolektif agar suatu masalah dapat diatasi secara sistematis. Kebijakan bukan hanya sekadar aturan formal, melainkan juga merupakan strategi dan arah tindakan yang memberi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi lebih luas lagi mencakup proses perumusan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, kebijakan selalu berkaitan erat dengan kepentingan publik, karena sasaran utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan menjadi jembatan antara gagasan ideal pemerintah dengan tindakan nyata yang diwujudkan melalui program, peraturan, maupun pelayanan publik.

Menurut Winarno (2015:23), kebijakan merupakan arah tindakan yang secara sengaja ditetapkan oleh aktor atau kelompok aktor dalam rangka mengatasi suatu permasalahan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan spontan, melainkan hasil dari pertimbangan rasional untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sementara itu, Dunn (2018:60) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah untuk memengaruhi masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan bisa berbentuk tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak melakukan sesuatu, sepanjang tujuannya diarahkan pada kepentingan publik.

Selanjutnya, Nugroho (2017:78) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan produk politik yang lahir dari proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Artinya, kebijakan bukanlah sesuatu yang muncul secara sepihak, melainkan hasil dari dialektika antara kepentingan negara dan aspirasi warga. Oleh karena itu, legitimasi kebijakan sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kebijakan merupakan hasil keputusan yang dibuat secara sadar, sistematis, dan terencana oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk menyelesaikan persoalan publik melalui tindakan nyata. Kebijakan bukan hanya menekankan aspek formalitas, melainkan juga

mencerminkan proses politik, sosial, dan administrasi yang kompleks dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang menghubungkan antara gagasan normatif dengan implementasi praktis di lapangan. Artinya, kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi harus diwujudkan melalui program, kegiatan, maupun regulasi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kualitas suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu merespons kebutuhan publik, memberikan solusi terhadap permasalahan, serta menciptakan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat.

b. Ciri-ciri Kebijakan

Kebijakan sebagai suatu produk keputusan publik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari keputusan pribadi atau organisasi biasa. Ciri-ciri kebijakan menunjukkan bahwa kebijakan memiliki dimensi formal, substantif, dan implementatif yang melekat, sehingga keberadaannya dapat diidentifikasi secara jelas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Winarno (2015:29), kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dikeluarkan oleh aktor atau lembaga yang memiliki kewenangan formal, seperti pemerintah atau lembaga negara.
- 2) Ditujukan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan publik, sehingga menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- 3) Memiliki sifat mengikat serta harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan selalu lahir dari otoritas yang sah dan memiliki daya paksa tertentu.

Sementara itu, Nugroho (2017:83) menyebutkan bahwa kebijakan publik ditandai oleh tiga hal utama, yaitu adanya tujuan

yang jelas, adanya instrumen atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut, serta adanya kelompok sasaran yang menjadi penerima manfaat. Dengan kata lain, kebijakan tidak hanya berhenti pada pernyataan niat, melainkan harus mengandung arah tindakan dan rencana operasional yang dapat dijalankan di lapangan.

Lebih lanjut, Subarsono (2016:21) menguraikan bahwa ciri khas kebijakan publik antara lain:

- 1) dibuat melalui suatu proses politik dan administratif
- 2) berlaku secara umum dan menyangkut orang banyak
- 3) bersifat mengikat karena didukung oleh kewenangan negara
- 4) membawa konsekuensi tertentu, baik berupa sanksi maupun perubahan sosial. Dari penjelasan ini terlihat bahwa kebijakan selalu terkait dengan dinamika politik dan birokrasi, sehingga keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari proses interaksi berbagai kepentingan.

Selain itu, Dunn (2018:64) menegaskan bahwa kebijakan dapat dikenali melalui cirinya yang berupa pilihan tindakan yang konsisten dan berkesinambungan, bukan keputusan yang bersifat insidental. Artinya, kebijakan memiliki kesinambungan dalam jangka waktu tertentu, karena ditujukan untuk mencapai hasil yang lebih luas daripada kepentingan jangka pendek.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan setidaknya meliputi lima hal pokok, yaitu:

- 1) Dibuat oleh otoritas yang sah, kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan formal.
- 2) Ditujukan untuk kepentingan publik, kebijakan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan individu atau kelompok semata.
- 3) Mengandung tujuan dan strategi kebijakan selalu dirancang dengan tujuan tertentu serta instrumen atau langkah untuk mencapainya.
- 4) Bersifat mengikat dan membawa konsekuensi, setiap pihak yang terkait wajib mematuhi kebijakan, dan ada sanksi jika dilanggar.

- 5) Merupakan hasil proses politik dan administratif, kebijakan lahir dari interaksi berbagai aktor dalam sistem pemerintahan yang kompleks.

Dengan demikian, ciri-ciri kebijakan tidak hanya memberikan batasan konseptual, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai apakah suatu keputusan pemerintah dapat benar-benar dikategorikan sebagai kebijakan publik atau sekadar keputusan administratif biasa. Pemahaman terhadap ciri-ciri ini penting agar penelitian mengenai kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan penanggulangan stunting, dapat dilakukan secara lebih terarah. Hal ini karena hanya kebijakan yang memenuhi karakteristik tersebut yang dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak lahir dan berjalan dalam ruang yang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor ini menentukan apakah kebijakan dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik atau justru mengalami hambatan. Pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan menjadi penting agar proses perumusan hingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Winarno (2015:41), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kebijakan publik, yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Faktor sosial mencakup dinamika masyarakat, termasuk kebutuhan, tuntutan, dan aspirasi warga. Faktor

ekonomi berhubungan dengan ketersediaan sumber daya, baik dana maupun sarana prasarana, sedangkan faktor politik berkaitan dengan kekuatan aktor-aktor politik dan bagaimana mereka memengaruhi arah kebijakan.

Subarsono (2016:28) menambahkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh faktor birokrasi, khususnya struktur organisasi dan mekanisme kerja aparatur. Jika birokrasi terlalu panjang dan prosedural, kebijakan akan sulit diimplementasikan secara cepat. Namun, jika birokrasi efisien, kebijakan dapat dijalankan lebih efektif.

Sementara itu, Nugroho (2017:95) menekankan pentingnya faktor komunikasi dan koordinasi antaraktor. Kebijakan akan lebih mudah terlaksana apabila terdapat komunikasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Tanpa adanya komunikasi yang memadai, kebijakan sering kali mengalami salah tafsir sehingga implementasinya tidak sesuai dengan tujuan awal.

Lebih lanjut, Dunn (2018:70) menjelaskan bahwa faktor lingkungan eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi, serta kondisi internasional juga dapat memengaruhi kebijakan publik. Misalnya, kebijakan kesehatan atau pendidikan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan standar global dan kemajuan teknologi yang mengubah cara pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan meliputi:

- 1) Faktor sosial, ekonomi, dan politik, yang mencerminkan dinamika kebutuhan masyarakat, kondisi ekonomi, dan kepentingan politik.
- 2) Faktor birokrasi dan kelembagaan, yaitu struktur organisasi dan mekanisme aparatur yang melaksanakan kebijakan.
- 3) Faktor komunikasi dan koordinasi, yang berhubungan dengan kejelasan informasi, hubungan antaraktor, serta partisipasi masyarakat.
- 4) Faktor lingkungan eksternal, seperti pengaruh globalisasi, teknologi, dan kondisi internasional yang tidak bisa diabaikan.

d. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, birokrasi, komunikasi, hingga kondisi lingkungan global menjadi determinan penting yang menentukan kualitas perumusan maupun keberhasilan implementasi kebijakan. Artinya, kebijakan yang baik bukan hanya dilihat dari kualitas dokumen atau rancangan program, melainkan juga dari sejauh mana pembuat kebijakan mampu memperhitungkan faktor-faktor yang memengaruhinya. Semakin tepat pengelolaan faktor-faktor tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses yang panjang dan sistematis. Proses ini tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan, tetapi juga berbagai aktor lain seperti birokrasi, masyarakat, kelompok kepentingan, hingga lembaga internasional. Karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai sebuah siklus, di mana setiap tahap saling terkait dan memengaruhi keberhasilan kebijakan secara keseluruhan.

Menurut Dunn (2018:96), proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yang berkesinambungan, yaitu:

- 1) Perumusan Agenda (Agenda Setting)

Pada tahap ini, isu-isu yang berkembang di masyarakat dipilih dan diprioritaskan untuk masuk ke agenda kebijakan pemerintah. Tidak semua masalah dapat langsung dijadikan kebijakan, karena adanya keterbatasan sumber daya dan perhatian politik.

- 2) Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)

Setelah suatu isu masuk ke dalam agenda, tahap berikutnya adalah perumusan alternatif kebijakan. Pada tahap ini, berbagai opsi atau strategi disusun untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi.

3) Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)

Tahap adopsi adalah saat pengambil keputusan yang memiliki kewenangan formal memilih salah satu alternatif kebijakan untuk dijadikan keputusan resmi.

4) Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Implementasi merupakan tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan pelayanan publik.

5) Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Evaluasi merupakan tahap terakhir dalam siklus kebijakan, yang berfungsi menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

Proses kebijakan publik merupakan sebuah siklus yang berkesinambungan. Setiap tahap, mulai dari perumusan agenda hingga evaluasi, saling terkait dan menentukan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Proses kebijakan yang baik tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat, dukungan sumber daya, koordinasi birokrasi, serta responsivitas terhadap perubahan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya proses yang sistematis, kebijakan publik diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Definisi ini menekankan bahwa implementasi merupakan tahap penting yang menjembatani antara gagasan dan kenyataan, antara konsep abstrak dengan realitas yang

dapat diukur hasilnya. Dengan kata lain implementasi tahapan esensial yang menentukan apakah suatu ide, kebijakan suatu program dapat berjalan efektif atau justru berhenti sebagai rencana tanpa hasil.

Implementasi juga dapat dipandang sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah rencana. Perencanaan yang baik sekalipun akan menjadi tidak berarti apabila implementasinya lemah. Sebaliknya, implementasi yang efektif mampu mengoptimalkan rencana yang efektif mampu mengoptimalkan rencana yang sederhana menjadi hasil yang besar. Oleh karena itu, tahap implementasi sering disebut tahap yang paling menentukan dalam keseluruhan proses manajemen, program, maupun kegiatan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2017: 145) implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Senada dengan hal tersebut, Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2016:) mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya berupa undang-undang, yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, serta penyusunan struktur implementasi.

Lebih lanjut, Grindle (dalam Winarno, 2017:127) menekankan bahwa implementasi adalah suatu proses tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, dengan fokus pada apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dijalankan. Pandangan ini menegaskan bahwa implementasi tidak hanya sebatas intruksi, melainkan juga mencakup hasil nyata di lapangan.

Pressman dan Wildavsky (dalam Wahab, 2017:63) memandang implementasi sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan untuk mencapainya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan tujuan, tetapi juga oleh mekanisme dan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Subarsono (2015:90), implementasi merupakan proses yang kompleks karena menyangkut interaksi antara tujuan program dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Implementasi dapat dianggap berhasil jika hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal yang telah dirumuskan.

Selanjutnya, Leo Agustino (2017:134) menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah digariskan dalam keputusan atau perencanaan.

Sementara itu, Wahab (2016:72) menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan suatu proses yang membutuhkan strategi, komunikasi, serta kemampuan adaptasi terhadap berbagai dinamika lingkungan.

Implementasi tidak hanya sebatas melaksanakan instruksi, tetapi juga mencakup bagaimana instruksi tersebut diterjemahkan, diorganisasikan, dan dipraktikkan sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, implementasi adalah upaya menghubungkan dunia ide dengan realitas sosial.

Implementasi merupakan tahap krusial dalam proses penyelenggaraan suatu program karena pada tahap ini gagasan yang

sebelumnya hanya tertuang dalam bentuk konsep, kebijakan, atau rencana, benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh sebab itu, implementasi selalu ditandai oleh adanya aktivitas yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Implementasi bukan sekadar aktivitas administratif yang statis, melainkan proses yang bersifat dinamis, berlangsung terus-menerus, dan melibatkan banyak aktor dengan peran yang berbeda. Tanpa adanya tindakan konkret, maka suatu rencana tidak bisa disebut telah diimplementasikan, melainkan masih berada pada tataran ide atau perencanaan.

b. Ciri-ciri Implementasi

Lebih jauh, implementasi juga dicirikan oleh adanya keterlibatan berbagai pihak. Tidak ada implementasi yang berjalan hanya dengan satu aktor saja. Dalam praktiknya, implementasi selalu melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan, aparatur pelaksana di tingkat teknis, organisasi atau lembaga yang mendukung, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan kata lain, implementasi adalah proses sosial yang diwarnai interaksi antaraktor dengan kepentingan, persepsi, dan kapasitas yang berbeda. Keterlibatan banyak pihak ini membuat implementasi seringkali bersifat kompleks, sehingga memerlukan koordinasi, pembagian peran, dan mekanisme komunikasi yang jelas.

Selain itu, ciri penting lain dari implementasi adalah adanya pemanfaatan sumber daya. Implementasi tidak dapat berlangsung hanya dengan kemauan politik atau kebijakan tertulis, melainkan

harus ditopang oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan program sering terhambat atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas sumber daya menjadi ciri khas yang selalu menyertai implementasi.

Implementasi juga memiliki karakter dinamis. Artinya, implementasi tidak berlangsung dalam ruang yang steril, melainkan berada dalam konteks sosial tertentu yang sarat dengan dinamika. Faktor lingkungan sosial, budaya masyarakat, kondisi politik, bahkan perubahan situasi ekonomi dapat memengaruhi jalannya implementasi. Inilah yang membuat implementasi harus selalu adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, serta fleksibel dalam menghadapi hambatan. Sifat adaptif ini menjadi pembeda antara implementasi yang berhasil dan yang gagal, sebab implementasi yang kaku dan tidak responsif terhadap dinamika lapangan biasanya sulit mencapai hasil optimal.

Purwanto dan Sulistyastuti (2015:22) menjelaskan bahwa implementasi dicirikan oleh keterhubungan antara keputusan yang dirumuskan dengan tindakan di lapangan. Artinya, implementasi adalah jembatan yang menghubungkan antara rumusan kebijakan dengan realitas pelaksanaan. Dalam jembatan ini, terdapat keterlibatan birokrasi sebagai pelaksana utama, aparat teknis yang bertugas di lapangan, serta masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek implementasi.

Syahrudin (2019:48) menambahkan bahwa implementasi bersifat adaptif, yaitu selalu menyesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga tidak berjalan secara kaku. Ia menekankan bahwa implementasi yang baik mampu bertransformasi mengikuti kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan, sehingga pelaksanaan program

tetap relevan dan tidak kehilangan arah meskipun menghadapi perubahan situasi.

Rodiyah (2022:61) menegaskan bahwa implementasi yang efektif ditandai dengan koordinasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pekerjaan birokrasi, tetapi proses kolaboratif. Koordinasi lintas sektor penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau benturan peran antarinstansi, sedangkan partisipasi masyarakat memastikan bahwa implementasi program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirangkum bahwa ciri utama implementasi meliputi:

- 1) Adanya tindakan nyata yang dapat diamati, bukan hanya berupa rencana atau dokumen.
- 2) Keterlibatan berbagai aktor dan sumber daya yang menjadi penopang keberlangsungan program.
- 3) Sifatnya yang dinamis dan adaptif, mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat.
- 4) Adanya koordinasi dan partisipasi, baik antarinstansi pelaksana maupun dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara umum, faktor utama yang memengaruhi implementasi meliputi sumber daya manusia, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur organisasi. Keempat aspek ini menjadi landasan dalam menilai kualitas implementasi di lapangan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2015:25), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik tenaga manusia, dana, maupun sarana pendukung. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu menjalankan program sesuai perencanaan, sementara dukungan anggaran dan fasilitas memadai menjadi pendorong kelancaran kegiatan. Tanpa dukungan sumber

daya yang cukup, program sulit dijalankan secara optimal meskipun telah direncanakan dengan baik.

Selain sumber daya, komunikasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Syahrudin (2019:52) menegaskan bahwa komunikasi antaraktor sangat menentukan, sebab informasi yang jelas dan dipahami oleh pelaksana akan mengurangi kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Komunikasi yang efektif tidak hanya mencakup penyampaian instruksi dari atasan ke bawahan, tetapi juga keterbukaan saluran komunikasi dua arah sehingga pelaksana dapat memberikan umpan balik dan laporan hambatan di lapangan.

Faktor berikutnya adalah disposisi atau sikap pelaksana. Rodiyah dkk. (2022:64) menekankan pentingnya sikap dan komitmen pelaksana, karena meskipun sumber daya mencukupi, implementasi tidak akan efektif jika pelaksana tidak memiliki kemauan, kepedulian, dan integritas dalam bekerja. Disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana mendukung tujuan program, memiliki tanggung jawab moral, serta kesediaan untuk bekerja sesuai prosedur. Komitmen yang kuat dari pelaksana akan memperbesar peluang keberhasilan implementasi. Selain itu, struktur organisasi juga berpengaruh besar terhadap jalannya implementasi. Struktur birokrasi yang jelas, pembagian tugas yang terukur, serta prosedur yang sederhana akan mempercepat proses pelaksanaan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang rumit, hierarki terlalu panjang, dan mekanisme berbelit justru memperlambat pencapaian hasil. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan organisasi yang efektif, dengan sistem koordinasi dan pengawasan yang memadai.

Menurut George C. Edward III (dalam Dwiyanto Indiahono, 2017: 31–34), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat sub variabel utama, yaitu:

- 1) Komunikasi
Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana isi kebijakan disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat.
- 2) Sumber Daya
Implementasi membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, finansial, sarana-prasarana, maupun kewenangan yang jelas.
- 3) Disposisi Pelaksana
Mengacu pada sikap, komitmen, serta keseriusan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dukungan dan integritas pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi.
- 4) Struktur Birokrasi
Birokrasi yang efektif memerlukan SOP yang jelas, koordinasi yang baik, serta pembagian kewenangan yang tidak tumpang tindih agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Subatier (Dalam Muhammad Ridha Suaib, 2016: 97-98) sub variabelnya yaitu:

- 1) Mudah atau Tidaknya Masalah Dikendalikan
Sejauh mana masalah yang ingin diatasi (dalam hal ini stunting) bisa dikendalikan atau ditangani. Jika masalah lebih sederhana, jelas, dan terukur, maka implementasi kebijakan akan lebih mudah dilakukan. Namun, jika masalah kompleks, melibatkan banyak faktor, dan sulit diukur, maka akan lebih sulit untuk dikendalikan.
- 2) Kemampuan Kebijakan untuk Menstruktur Proses Implementasi
Seberapa jelas dan lengkap kebijakan tersebut mengatur langkah-langkah implementasi. Kebijakan yang baik biasanya sudah dilengkapi dengan tujuan yang jelas, pembagian tugas, sumber daya, prosedur pelaksanaan, serta indikator evaluasi. Semakin jelas kebijakan, semakin mudah pula pelaksanaannya.
- 3) Variabel di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi
Faktor eksternal yang berada di luar isi kebijakan, tetapi berpengaruh terhadap pelaksanaan. Misalnya: kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dukungan politik, budaya, lingkungan, maupun peran aktor lain (LSM, media, tokoh masyarakat). Faktor eksternal ini bisa mendukung atau justru menghambat implementasi kebijakan.

Menurut Thomas B. Smith (Dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015: 92) Implementasi kebijakan, sub variabelnya sebagai berikut:

1. Kebijakan yang Diidealkan
Merupakan rancangan kebijakan yang berisi tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapainya. Pada tahap ini, kebijakan masih bersifat konseptual atau normatif, sehingga membutuhkan interpretasi yang tepat dalam pelaksanaannya.
2. Organisasi Pelaksana
Yaitu lembaga atau instansi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya, koordinasi antarbagian, serta komitmen dari aparat pelaksana kebijakan
3. Kelompok Sasaran
Merupakan kelompok atau masyarakat yang menjadi objek dari pelaksanaan kebijakan. Respons, tingkat partisipasi, serta penerimaan dari kelompok sasaran sangat memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan yang diterapkan.
4. Faktor Lingkungan
Yaitu kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di lingkungan masyarakat yang dapat mendukung atau justru menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

3. Remaja Putri

a. Pengertian Remaja Putri

Masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan manusia yang paling penting dan kompleks dalam siklus kehidupan. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan yang bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional, yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Menurut Hurlock (2015: 207), masa remaja adalah periode perkembangan yang dimulai ketika individu mencapai kematangan seksual dan berakhir ketika mencapai kematangan sosial dan emosional, yang ditandai dengan kemampuan untuk memikul tanggung jawab serta berperan sebagai anggota masyarakat yang mandiri.

Definisi lain dikemukakan oleh World Health Organization (WHO, 2020) yang menyebutkan bahwa remaja adalah individu yang berada dalam rentang usia 10–19 tahun, suatu masa transisi yang kompleks dari ketergantungan menuju kemandirian. Masa ini ditandai oleh percepatan pertumbuhan fisik dan kematangan fungsi reproduksi, serta perubahan cara berpikir dan pola hubungan sosial. WHO juga menegaskan bahwa remaja merupakan kelompok usia strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa pada masa mendatang.

Remaja putri adalah bagian dari populasi remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang khas, terutama dari segi biologis dan reproduktif.

Menurut Sarwono (2018: 47), remaja putri adalah individu perempuan yang berada dalam rentang usia remaja dan ditandai dengan kematangan organ reproduksi, perubahan hormonal, serta munculnya tanda-tanda fisik sekunder seperti menarche (menstruasi pertama), pertumbuhan payudara, dan perubahan bentuk tubuh..

Desmita (2019: 220) menjelaskan bahwa pada masa ini, remaja putri mulai membentuk konsep diri perempuan (feminine identity) yang berpengaruh terhadap cara berpikir, perilaku, serta interaksi sosialnya. Remaja putri cenderung lebih peka terhadap penampilan dan pandangan orang lain, terutama dalam hal citra tubuh (body image) dan penerimaan sosial.

Menurut Suryana (2021: 64-66), remaja putri termasuk kelompok yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, anemia akibat defisiensi zat besi, serta gangguan psikologis seperti stres dan kecemasan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan intervensi khusus untuk menjaga kesehatan mereka secara komprehensif.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023:164) juga menegaskan bahwa remaja putri merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan kesehatan nasional. Hal ini dikarenakan kondisi kesehatan remaja putri pada masa kini akan sangat menentukan kualitas generasi berikutnya. Program-program seperti pemberian tablet tambah darah (TTD), edukasi gizi seimbang, dan pendidikan kesehatan reproduksi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup remaja putri serta mencegah terjadinya masalah gizi seperti anemia dan stunting.

Dengan demikian, remaja putri dapat dipahami sebagai individu perempuan pada masa transisi perkembangan yang tidak hanya ditandai oleh kematangan fisik dan biologis, tetapi juga oleh pencarian jati diri, pembentukan peran sosial, dan peningkatan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

b. Ciri-Ciri dan Karakteristik Remaja Putri

Menurut Monks, Knoers, dan Haditono (2018: 135), masa remaja putri memiliki sejumlah ciri khas yang dapat dilihat dari beberapa aspek perkembangan berikut:

1) Aspek Fisik dan Biologis

Terjadi peningkatan tinggi dan berat badan yang pesat, pertumbuhan jaringan lemak, serta munculnya tanda-tanda sekunder seperti pembesaran payudara dan pertumbuhan rambut halus di beberapa bagian tubuh. Dimulainya menstruasi pertama (menarche) merupakan indikator penting dari kematangan fungsi reproduksi.

2) Aspek Psikologis dan Emosional

Remaja putri cenderung mengalami fluktuasi emosi yang tinggi akibat perubahan hormonal. Mereka mulai peka terhadap penilaian sosial dan berusaha mendapatkan pengakuan dari lingkungan.

3) Aspek Sosial

Remaja mulai memperluas hubungan sosialnya, menjalin pertemanan di luar lingkungan keluarga, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Pengaruh teman sebaya menjadi sangat dominan dalam pembentukan sikap dan perilaku sosialnya.

4) Aspek Moral dan Nilai

Remaja mulai mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai moral, tanggung jawab pribadi, dan kesadaran sosial. Mereka mulai mempertanyakan norma yang berlaku serta mencari dasar moral yang sesuai dengan pandangan pribadinya.

Sejalan dengan itu menurut Dewi Rahaya dkk (2024:3-4) karakteristik pertumbuhan remaja yang khas adalah sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan fisik meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase remaja awal (11-14 tahun), karakteristik seks sekunder mulai tampak.
- 2) Pertumbuhan tulang dan massa tulang meningkat pesat. Sekitar 45% tambahan massa tulang terjadi pada masa remaja dan pada akhir dekade kedua kehidupan 90% massa tulang tercapai.
- 3) Pertumbuhan otak dan perkembangan kognitif meningkat pesat.

Selain perubahan biologis dan fisiologis, remaja juga mengalami perubahan psikologis dan sosial yaitu:

- 1) Peningkatan emosional merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja
- 2) Perubahan yang cepat secara fisik yang disertai kematangan seksual
- 3) Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Remaja tidak lagi berhubungan hanya dengan individu dari jenis kelamin yang sama, tetapi juga dengan lawan jenis, dan dengan orang dewasa
- 4) Perubahan nilai, dimanahal yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting saat mereka mendekati dewasa, demikian juga sebaliknya.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja Putri

Menurut Desmita (2019: 228), perkembangan remaja putri dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, di antaranya:

1) Faktor Biologis

Meliputi faktor genetik, kondisi kesehatan, status gizi, serta keseimbangan hormon yang memengaruhi pertumbuhan fisik dan kematangan seksual.

2) Faktor Keluarga

Pola asuh orang tua, komunikasi yang terjalin dalam keluarga, dan dukungan emosional menjadi dasar pembentukan kepribadian remaja putri. Keluarga yang harmonis dan terbuka mampu mendorong tumbuhnya rasa aman serta kepercayaan diri pada remaja.

3) Faktor Lingkungan Sosial

Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja putri, terutama dalam hal gaya hidup, pola makan, dan perilaku kesehatan. Pengaruh teman sebaya merupakan determinan dominan terhadap perilaku sosial dan kebiasaan remaja putri di sekolah.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam membentuk cara berpikir kritis dan karakter remaja putri. Lingkungan sekolah yang sehat dan edukatif dapat mengarahkan remaja pada perilaku positif dan peningkatan prestasi akademik.

4. Program Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

a. Pengertian Tablet Tambah Darah (TTD)

Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan suplemen yang mengandung zat besi (Fe) dan asam folat yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi besi, khususnya pada remaja putri dan wanita usia subur.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018:8) Tablet Tambah Darah (TTD) adalah suplemen gizi penambah darah berbentuk tablet/kaplet/kapsul yang bisa didapatkan dari program yang disediakan oleh Pemerintah dan disalurkan ke kelompok sasaran melalui fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah ataupun mandiri yang diperoleh berdasarkan resep/instruksi tenaga kesehatan, inisiatif membeli sendiri di fasilitas kesehatan swasta/apotik/toko obat, atau diperoleh dari pemberian keluarga/orang lain.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023: 20) Tablet Tambah Darah (TTD) sebagai suplementasi yang merupakan penambahan makanan atau zat gizi untuk mendukung kecukupan gizi. Suplementasi gizi untuk ibu hamil diberikan dalam bentuk makanan tambahan dan Tablet Tambah Darah (TTD),

sementara bagi remaja putri dan wanita usia subur diberikan Tablet Tambah Darah (TTD).

Sedangkan menurut Ismawati (2018:45-46) Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan tablet suplemen pencegahan anemia zat besi untuk ibu hamil serta remaja putri. Melengkapi zat besi dengan tablet zat besi adalah metode yang efektif untuk mencegah dan mengatasi anemia karena kekurangan asam folat.

Menurut Ahmad Hidayat Rachman (2018: 45-46) Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan tablet sebagai suplementasi yang mengandung Fero sulfat 200 mg atau setara 60 mg besi elemental dan 0, 25 mg asam folat untuk penanggulangan anemia gizi besi.

b. Manfaat Tablet Tambah Darah (TTD)

Manfaat Tablet Tambah Darah (TTD) yaitu:

- 1) Pengganti zat besi yang hilang bersama darah pada wanita dan remaja putri saat haid.
- 2) Wanita hamil, menyusui, sehingga kebutuhan zat besinya sangat tinggi yang perlu disediakan sedini mungkin semenjak remaja
- 3) Mengobati wanita dan remaja putri yang menderita anemia
- 4) Meningkatkan kemampuan belajar, kemampuan kerja dan kualitas sumber daya manusia seta generasi penerus.
- 5) Meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja putri.

Menurut Nurul Dwi Permatasari, dkk (2018: 72-75) zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin di tubuh sehingga dapat membantu mengatasi anemia saat menstruasi, hamil, menyusui, masa pertumbuhan dan setelah megalami pendarahan. Asam folat digunakan untuk mengurangi anemia megaloblastik selama pertumbuhan dan kehamilan yang mengandung zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah

(hemoglobin). Selain itu, mineral ini berperan sebagai komponen untuk membentuk mioglobin (protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat di tulang rawan dan tulang penyambung), serta ezim.

c. Aturan Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020: 5-

7) Tablet Tambah Darah (TTD) merupakan salah satu suplementasi sebagai intervensi dalam perbaikan gizi, apabila diminum sesuai aturan pakai. Aturan pemakaian tablet tambah darah pada remaja putri sebagai berikut:

- 1) Minum satu tablet tambah darah seminggu sekali dan dianjurkan minum satu tablet per hari setiap hari selama haid.
- 2) Minum tablet tambah darah dengan air putih, jangan minum dengan teh, susu, atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya jadi berkurang.
- 3) Efek samping yang di timbulkan gejala ringan yang tidak membahayakan seperti perut terasa tidak enak, mual, susah BAB dan tinja berwarna hitam.
- 4) Untuk mengurangi efek samping, minum tablet tambah darah setelah makan malam menjelang tidur, akan tetapi bila setelah minum Tablet Tambah Darah (TTD) di sertai makan buah buahan.
- 5) Simpan tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung, jauh dari jangkauan anak dan setelah di buka harus ditutup kembali dengan rapat tablet Tambah darah yang sudah berubah warna sebaiknya tidak di minum (warna asli: merah darah).
- 6) Tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kelebihan darah.

b. Tujuan dan Manfaat Pemberian Tablet Tambah Darah

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2019),

pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah anemia.
- 2) Meningkatkan kebugaran dan konsentrasi belajar remaja di sekolah.
- 3) Mempersiapkan remaja putri menjadi calon ibu yang sehat di masa depan.
- 4) Meningkatkan status gizi dan produktivitas generasi muda.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berpikir yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan keterkaitan antara teori, konsep, fenomena, dan permasalahan penelitian.

Penelitian ini berangkat dari Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Remaja Putri yang menjadi dasar pelaksanaan program di daerah. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaksanaan kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas sektor antara dinas kesehatan, pihak sekolah, tenaga kesehatan puskesmas, dan guru UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) agar distribusi serta konsumsi tablet tambah darah dapat berjalan sesuai standar

Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015: 92) Implementasi kebijakan, sub variabelnya sebagai berikut:

1. Kebijakan yang Diidealkan

Merupakan rancangan kebijakan yang berisi tujuan, sasaran, serta strategi untuk mencapainya. Pada tahap ini, kebijakan masih bersifat konseptual atau normatif, sehingga membutuhkan interpretasi yang tepat dalam pelaksanaannya.

2. Organisasi Pelaksana

Yaitu lembaga atau instansi yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan. Efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya, koordinasi antarbagian, serta komitmen dari aparat pelaksana kebijakan

3. Kelompok Sasaran

Merupakan kelompok atau masyarakat yang menjadi objek dari pelaksanaan kebijakan. Respons, tingkat partisipasi, serta penerimaan dari kelompok sasaran sangat memengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

4. Faktor Lingkungan

Yaitu kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di lingkungan masyarakat yang dapat mendukung atau justru menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

